



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA **BIRO PERENCANAAN DAN** **KEUANGAN** **TAHUN 2023** **(REVISI)**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Revisi Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada Pimpinan Eselon I (Sekretaris Jenderal) atas pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023. Selain itu juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Revisi Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna penyusunan Revisi Laporan Kinerja TA 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Dalam Penetapan Kinerja ini ada 2 (dua) sasaran output dan 8 (delapan) indikator kinerja. Anggaran untuk membiayai rencana kinerja tersebut dalam Tahun 2023 sebesar **Rp.92.883.215.000,-**

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka laporan ini kami susun.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan khususnya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara umum.

Jakarta, 18 Juli 2024
**Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan**

Tatang Garjito



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP:196705131988021001

Digital Signature
mk-2042540072240718023101

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja, dan
2. Pengelolaan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian.

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki visi :

“Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang andal demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya”

Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi, yaitu

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi yang akurat dan terpercaya.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MK secara cermat, transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 92.883.215.000,-** dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 37 orang.

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari:

1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu 85%;
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran Skor 85;

3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu 100%;
4. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti 90%;
5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan Skor 81
6. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi 95%;
7. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan 100%;
8. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan 100%;

Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

Pada tahun 2023 hasil Survei Pengukuran Indeks untuk layanan, mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai pelayanan sebesar **81,06**. Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari dua jenis layanan yakni Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada kedua jenis Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan:

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3,226	Baik
2	U2. Prosedur	3,237	Baik
3	U3. Sarana dan Prasarana	3,259	Baik
4	U4. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,237	Baik
5	U5. Perilaku Pelaksana	3,248	Baik
6	U6. Waktu Penyelesaian	3,321	Baik
7	U7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,182	Baik
8	U8. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,197	Baik
9	U9. Kompetensi Pelaksana	3,274	Baik
	Nilai Indeks	3,242	Baik
	Nilai Konversi	81,06	Baik

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari 8 indikator secara rata-rata memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar **105,28%**. Sedangkan dari aspek anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki anggaran sebesar Rp.92.883.215.000,- dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.92.828.386.409,- (99,94%) dan sisa anggaran sebesar Rp.54.828.591,- (0,06%).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Lembar Pernyataan Telah Direviu	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A Penjelasan Umum Organisasi	1
B Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran	2
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	4
1. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas	7
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Tahun 2021	15
A. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas	16
B. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	36
C. Prestasi Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Lainnya	49
 BAB IV PENUTUP	55

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Jakarta, 18 Juli 2024

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Tatang Garjito



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP:196705131988021001

Digital Signature
mk-149999370240718015251

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit kerja instansi untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2023.

LKj ini disusun sebagai: **(1)** Pelaksanaan Akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan; **(2)** Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran dan; **(3)** Gambaran tingkat keberhasilan/kegagalan capaian pelaksanaan program/kegiatan.

A. Penjelasan Umum Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17 sebagai berikut :

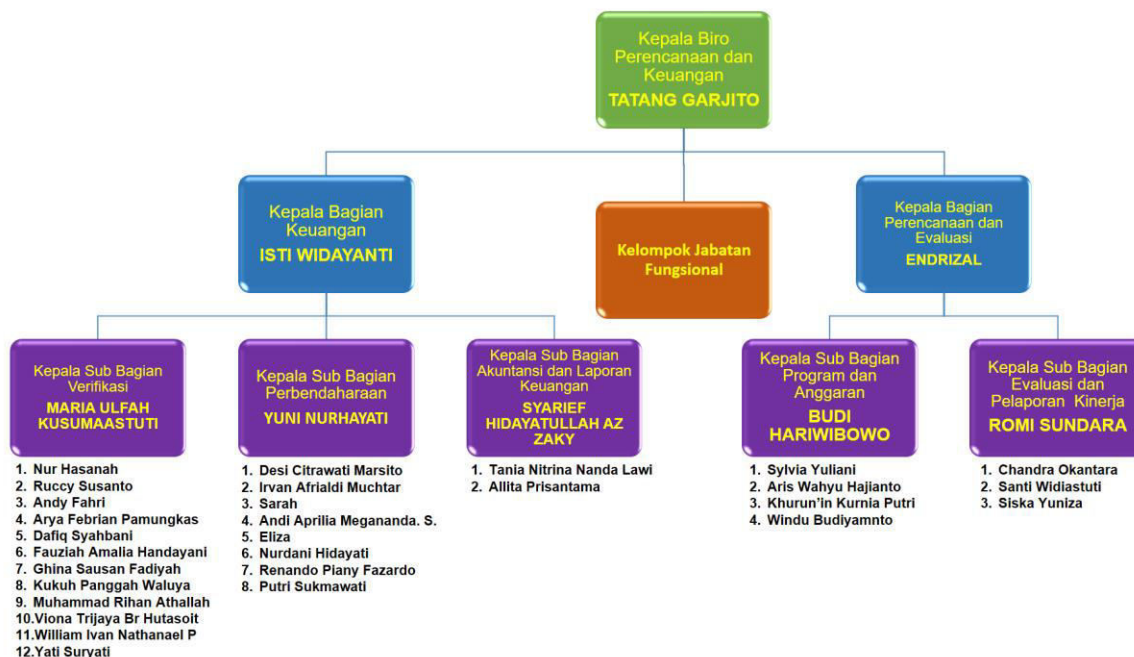
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja, dan
- b. Pengelolaan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian Adapun struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi
Biro Perencanaan dan Keuangan



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 (dua) Bagian, yaitu :

1. **Bagian Perencanaan dan Evaluasi**, dengan tugas melaksanakan penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
2. **Bagian Keuangan**, dengan tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran

Sumberdaya manusia pada Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 mempunyai 29 orang pegawai dengan rincian :

Tabel 1
Jumlah SDM Biro Perencanaan dan Keuangan
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Kepala Biro	Bagian Perencanaan, dan Evaluasi	Bagian Keuangan	Jumlah
1	Menurut Jabatan				37
	a. Struktural				
	- Eselon II	1			1
	- Eselon III		1	1	2

	- Eselon IV		2	3	5
	b. Fungsional				
	c. Staf		7	22	29
2	Menurut Golongan				37
	a. Golongan IV	1	2	3	6
	b. Golongan III		8	13	21
	c. Golongan II			10	10
3	Menurut Pendidikan				37
	a. Pendidikan S-2	1	6	7	14
	b. Pendidikan S-1		4	8	10
	c. Pendidikan D-3		1	12	13

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh program dan kegiatan APBN yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp. 104.612.344.000,- yang kemudian direvisi sehingga pagu anggaran untuk Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sebesar Rp. 92.883.215.000,-. Secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2
Pagu Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

No	Bagian	Jumlah
1	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Rp. 2.970.321.000
2	Bagian Keuangan	Rp. 89.912.894.000
Total Anggaran		Rp. 92.883.215.000

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja

Hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 atas kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/78/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Konstitusi memperoleh **nilai 76,41 atau predikat “BB”**. Penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“sangat baik”** yaitu implementasi sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi).

Dalam Renstra MK Tahun 2020-2024, Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024.

Misi Mahkamah Konstitusi :

1. **Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;**
2. **Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;**
3. **Meningkatkan Kualitas Putusan.**

Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi;
3. Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara;

Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Biro Perencanaan dan Keuangan.

Visi Biro Perencanaan dan Keuangan

“Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang andal demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya”

Misi Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi yang akurat dan terpercaya;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MK secara cermat, transparan dan akuntabel.

Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi:

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat integritas peradilan konstitusi	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatkan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya

2. Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan kualitas putusan	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara

Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang terkait dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:

1. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel;

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan pada bulan Januari 2022 yang mengukur 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja.

Target Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 di Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Target Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023
(Sesuai Renstra 2020-2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu	85%
		2 Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85
		3 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%
		4 Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 81
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%
		2 Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%
		3 Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%

1. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas

- a. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu sepanjang tahun 2023, meliputi :
 - 1) Dokumen usulan prioritas Nasional dan Prioritas KL Tahun 2024;
 - 2) Dokumen usulan pagu indikatif MK Tahun 2024;
 - 3) Dokumen reviu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) MK;
 - 4) Dokumen Rencana Kerja MK;
 - 5) Dokumen Standar Biaya Masukan Tahun 2023;
 - 6) Dokumen draft Standar Biaya Keluaran Tahun 2023;
 - 7) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Anggaran;
 - 8) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Alokasi Anggaran;
 - 9) Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - 10) Dokumen Proposal PNBK Tahun 2023;
 - 11) Dokumen usulan perubahan struktur anggaran MK TA 2023;
 - 12) Dokumen kebutuhan anggaran Penanganan Perkara Konstitusi TA 2022 dan TA 2023;
 - 13) Dokumen penyampaian data target dan capaian Kinerja MK dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2024;
 - 14) Dokumen penyampaian masukan dan sasaran terkait Standar Biaya Masukan TA 2024;
 - 15) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L dan RKP K/L MK TA 2023 (Pagu Indikatif);
 - 16) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang Realisasi Anggaran 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran 2023;
 - 17) Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L Tahun 2023, Laporan Kinerja TA 2021, 2022;
 - 18) Dokumen rencana aksi kegiatan TA 2023;
 - 19) Dokumen rencana penyerapan dana TA 2023;
 - 20) Dokumen rencana umum pengadaan TA 2023;
 - 21) Dokumen Revisi Anggaran 1 (DIPA 01);
 - 22) Dokumen Revisi Anggaran 2 (DIPA 02);
 - 23) Dokumen Revisi Anggaran 3 (DIPA 03);
 - 24) Dokumen Revisi Anggaran 4 (DIPA 04);

- 25) Dokumen Revisi Anggaran 5 (DIPA 05);
- 26) Dokumen Revisi Anggaran 6 (DIPA 06);
- 27) Dokumen Revisi Anggaran 7 (DIPA 07);
- 28) Dokumen Revisi Anggaran 8 (DIPA 08);
- 29) Dokumen Revisi Anggaran 9 (DIPA 09);
- 30) Dokumen Revisi Anggaran 10 (DIPA 10);
- 31) Dokumen Revisi Anggaran 11 (DIPA 11);
- 32) Dokumen Revisi Anggaran 12 (DIPA 12);
- 33) Dokumen Revisi Anggaran 13 (DIPA 13);
- 34) Dokumen Revisi Anggaran 14 (DIPA 14);
- 35) Dokumen Revisi Anggaran 15 (DIPA 15);
- 36) Laporan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2023;
- 37) Laporan Rapat Kerja MK Tahun 2023;
- 38) Revisi Rencana Strategis MK 2020-2024;
- 39) Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023.

Sasaran kegiatan (output) Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasarnya berupa target tercapai jika 85% Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran telah tersusun dengan tepat waktu dengan memakai rumus sebagai berikut:

% Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu	=	$\frac{\text{Realisasi Dokumen perencanaanstrategis, kinerja dan anggaranyang disusun tepat waktu}}{\text{Target Dokumen perencanaanstrategis, kinerja dan anggaranyang disusun tepat waktu}} \times 100\%$
---	---	---

b. Indeks Kualiatas Pengelolaan Anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran,

dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

- 1) Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1) Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2) Belanja Kontraktual

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN;
- b) Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN;

- c) Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.
- 3) Penyelesaian Tagihan
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN;
- 4) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai;
 - b) Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai;
 - c) Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran
- 5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.
Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output;
 - b) Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO).

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA : 10 persen;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;

- 3) Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- 4) Belanja Kontraktual : 10 persen;
- 5) Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- 6) Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- 7) Dispensasi SPM : 5 persen;
- 8) Capaian Output : 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/> Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- 1) Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- 2) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- 3) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
- 4) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

- c. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi. LAKIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Secara eksternal, LAKIP dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang ada di lingkungan MKRI.

- d. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemen PANRB melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja MK disampaikan setiap tahun oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PANRB. Aspek yang dinilai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh MK untuk perbaikan kinerja MK di tahun mendatang. Sehingga rumus perhitungan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP MK, adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh MK}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi Kemen PANRB}} \times 100\%$$

e. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan.

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2023 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 tingkat layanan perencanaan dan keuangan ditargetkan dengan Skor 81. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 diperoleh dengan cara melakukan kegiatan Survei Internal Tingkat Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

a. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2023.

Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 persentase penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebesar 95%. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 2023 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

b. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa laporan keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan di pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal pertama yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti diketahui bahwa total volume APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume

transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan menargetkan capaian sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan} = \frac{\text{Jumlah Capaian Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}}{\text{Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}} \times 100\%$$

c. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Tujuan pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebesar 100%.

Sesuai dengan rencana aksi Perjanjian Kinerja, target indikator kinerja Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan tercapai apabila Gaji dan Tunjangan pegawai MK telah dibayarkan selama 12 bulan. Sehingga Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam Tahun 2023 dapat dihitung memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan} = \frac{\text{Realisasi bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan}}{\text{Target Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Biro Perencanaan dan Keuangan adalah prosentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi.

Ketiga sasaran output yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan seperti: **(1)** Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas, **(2)** Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024.

Tabel 4
Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu	85%	100%	117,65%
		2	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85	Skor 92,54	108,87%
		3	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%	100%
		4	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 81	Skor 81,06	100,07%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	99,33%	104,56%
		2	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%
		3	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN						105,28%

Realisasi Kinerja sesuai dengan tabel di atas mencapai **105,28%** sehingga dengan kata lain dapat diambil kesimpulan seluruh capaian output baik sasaran dan indikator masuk kategori “**Berhasil**”. Adapun kesimpulan **Berhasil** tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 5
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

A. Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang Berkualitas

1. Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu

Sasaran kegiatan (output) Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasarnya berupa target tercapai jika 85% Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran telah tersusun dengan tepat waktu dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{\% Tersusunnya} \\ \text{\% Dokumen} \\ \text{\% Perencanaan} \\ \text{\% Strategis, Kinerja dan} \\ \text{\% Anggaran yang tepat} \\ \text{\% waktu} \end{array} = \frac{\text{Realisasi Dokumen perencanaan} \\ \text{strategis, kinerja dan anggaran} \\ \text{yang disusun tepat waktu}}{\text{Target Dokumen perencanaan} \\ \text{strategis, kinerja dan anggaran} \\ \text{yang disusun tepat waktu}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{85\%} \times 100 = 117,65\%$$

Capaian indikator kinerja persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis dan anggaran yang tepat waktu	85%	100%	117,65%

Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu yang ditargetkan tersusun sepanjang tahun 2023 sebesar 85%. Pada tahun 2023 telah terealisasi dokumen Perencanaan Strategis, Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu sebesar 100%. Sehingga diperoleh capaian 117,65%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Adapun dokumen perencanaan program kerja dan anggaran yang terealisasi adalah:

Tabel 6
Target dan Realisasi Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023

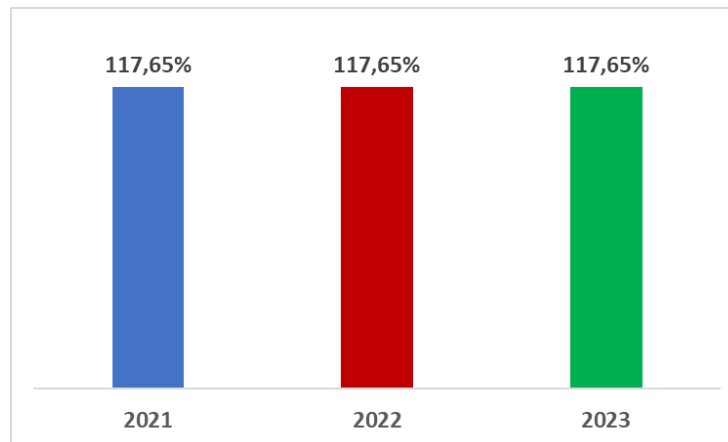
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Waktu Penyusunan
1	Dokumen PNBK MK Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2023
2	Dokumen usulan prioritas Nasional dan Prioritas KL Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2023
3	Dokumen usulan pagu indikatif MK Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Februari 2023
4	Dokumen rewi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) MK	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Maret, Juni 2023
5	Dokumen Rencana Kerja MK	1 laporan	1 laporan	100%	April-Juni, Oktober-November 2023
6	Dokumen draft Standar Biaya Keluaran Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	April 2023
7	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Anggaran	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2023
8	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA K/L) Pagu Alokasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	100%	Oktober-November 2023

9	Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	1 laporan	1 laporan	100%	Desember 2023
10	Dokumen Proposal PNPB Tahun 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Januari 2023
11	Dokumen usulan perubahan struktur anggaran MK TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Februari-Maret 2023
12	Dokumen kebutuhan anggaran Penanganan Perkara Konstitusi TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
13	Dokumen penyampaian data target dan capaian Kinerja MK dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2023
14	Dokumen penyampaian masukan dan sasaran terkait Standar Biaya Masukan TA 2024	1 laporan	1 laporan	100%	September 2023
15	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L dan RKP K/L MK TA 2024 (Pagu Indikatif)	1 laporan	1 laporan	100%	Juni 2023
16	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang Realisasi Anggaran 2022 dan Rencana Kerja dan Anggaran 2024	1 laporan	1 laporan	100%	Juli 2023
17	Laporan RDP Komisi III DPR RI dengan MK tentang RKA K/L Tahun 2023, Laporan Kinerja TA 2021, 2022	1 laporan	1 laporan	100%	September 2023
18	Dokumen rencana aksi kegiatan TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Maret 2023
19	Dokumen rencana penyerapan dana TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2023
20	Dokumen rencana umum pengadaan TA 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2023
21	Dokumen Revisi Anggaran 1 (DPA 01)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
22	Dokumen Revisi Anggaran 2 (DPA 02)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
23	Dokumen Revisi Anggaran 3 (DPA 03)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023

24	Dokumen Revisi Anggaran 4 (DPA 04)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
25	Dokumen Revisi Anggaran 5 (DPA 05)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
26	Dokumen Revisi Anggaran 6 (DPA 06)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
27	Dokumen Revisi Anggaran 7 (DPA 07)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
28	Dokumen Revisi Anggaran 8 (DPA 08)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
29	Dokumen Revisi Anggaran 9 (DPA 09)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
30	Dokumen Revisi Anggaran 10 (DPA 10)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
31	Dokumen Revisi Anggaran 11 (DPA 11)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
32	Dokumen Revisi Anggaran 12 (DPA 12)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
33	Dokumen Revisi Anggaran 13 (DPA 13)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
34	Dokumen Revisi Anggaran 14 (DPA 14)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
35	Dokumen Revisi Anggaran 15 (DPA 15)	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
36	Laporan Rapat Kerja MK Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Desember 2023
37	Revisi Rencana Strategis MK 2020-2024	1 laporan	1 laporan	100%	Oktober-Desember 2023
38	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023	1 laporan	1 laporan	100%	Januari-Oktober 2023

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2021-2022

Capaian tahun 2023, 2022, dan 2021 seluruhnya sama yaitu 117,65%. Namun jika dibandingkan dengan output jumlah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran yang dihasilkan, pada tahun 2021 telah dihasilkan 37 dokumen kinerja, sedangkan pada tahun 2022 telah dihasilkan 39 dokumen kinerja, dan pada tahun 2023 telah dihasilkan 38 dokumen kinerja. Namun seluruh realisasi output dokumen tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.



2. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA : 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual : 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- g. Dispensasi SPM : 5 persen;
- h. Capaian Output : 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/> Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Capaian Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85	Skor 92,54	108,87%

Pada tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA) MK sebesar Skor 92,54, melebihi target Skor 85, sehingga diperoleh capaian 108,87%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Sasaran kegiatan (output) Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran berdasarkan perhitungan nilai IKPA Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023 dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN **memperoleh nilai 92,54 atau predikat Baik** dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Indikator Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	018	077	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Nilai	100.00	70.89	84.16	89.42	99.25	97.52	100.00	100.00	92.54	100%	92.54
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.09	16.83	8.94	9.93	9.75	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	85.45		94.07					100.00			

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan tahun 2022

Indikator kinerja IKPA tahun 2023 sebesar Skor 92,54, merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. Meskipun tidak dibandingkan, dapat diketahui bahwa capaian IKPA tahun 2022 adalah sebesar Skor 94,40. Terdapat sedikit penurunan sebesar 1,86 point. Perbedaan nilai IKPA setiap tahunnya utamanya disebabkan karena perbedaan pada kualitas perencanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran.

3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu

Capaian Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	100%	100%

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi telah disampaikan kepada Kemen PANRB tepat waktu yaitu tanggal 29 Februari 2024, melalui aplikasi esr.menpan.go.id. sehingga capaian indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu adalah 100%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/78/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, MK mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar **76,41** atau predikat “**BB**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Sangat Baik**” yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 lalu sebesar **76,08** dengan predikat “**BB**”.

Tabel 8
Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2022-2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,90	24,92
2	Pengukuran Kinerja	30	21,22	21,37
3	Pelaporan Kinerja	15	12,31	12,36
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,65	17,76
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,08	76,41
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel 9
Kategori menurut Permenpan No. 12 Tahun 2015

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Gambar 2
Laporan Kinerja MK dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022



a. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal berisikan informasi capaian kinerja selama tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2021 sebesar **111,28%** dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal telah **Berhasil** mewujudkan 8 (delapan) sasaran program berupa: (1) Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif; (2) Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya; (3) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang

Berkualitas; (4) Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya; (5) Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional; (6) Terselenggaranya Penanganan Perkara Konstitusi yang Bermutu; (7) Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK; (8) Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat.

Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar **113,15%** dengan kategori “**Berhasil**” yang terangkum dalam 15 (lima belas) indikator.

Gambar 3
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MK Tahun 2022



b. Laporan Kinerja Kepaniteraan

Laporan Kinerja Kepaniteraan berisikan informasi capaian kinerja selama tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 sebesar **132%** dengan 4 (empat) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa Kepaniteraan dapat dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dalam mewujudkan 2 (dua) sasaran

strategis berupa: (1) Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu; (2) Tersedianya Dokumen Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis.

Capaian ini mengalami penurunan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar **137%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** yang terangkum dalam 6 (enam) indikator.

Gambar 4
Laporan Kinerja Kepaniteraan MK Tahun 2022



c. Laporan Kinerja Biro/Pusat Tahun 2022

Selain menyampaikan laporan kinerja level Lembaga dan Eselon I, tingkat Eselon II juga harus menyampaikan laporan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan yang tersusun selama tahun 2022 adalah 9 laporan dari seluruh unit, sebagaimana gambar di bawah ini.

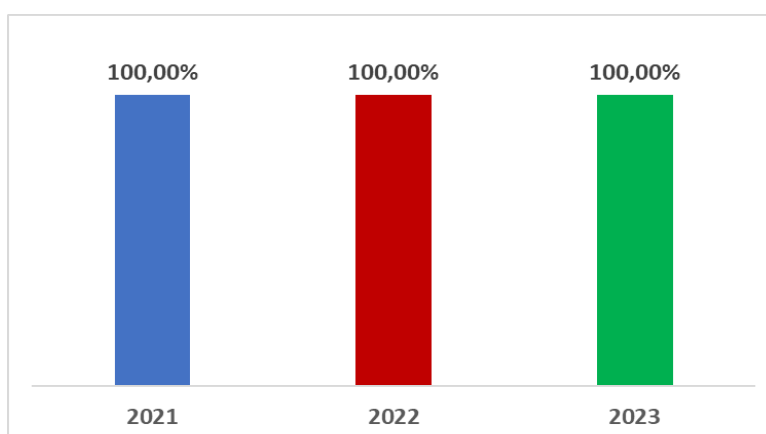
Gambar 5
Hasil Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2022



Semua capaian kinerja dari Eselon II dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2021-2022

Baik pada tahun 2021, 2022, maupun 2023, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi telah disusun dan disampaikan ke Kemen PANRB tepat waktu yaitu tanggal 28 atau 29 Februari, sesuai yang diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga capaian indikator Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu tahun 2021-2023, tercapai 100%.



4. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PANRB Nomor B/78/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja MK tahun 2023 adalah sebesar 76,41 dengan predikat BB.

Terkait progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP MK tahun 2023, dari 10 rekomendasi Kemen PANRB, seluruhnya sudah ditindaklanjuti. Sehingga Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP MK tahun 2023, adalah sebesar 100% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100\% = \frac{10 \text{ rekomendasi}}{10 \text{ rekomendasi}} \times 100\% = 100\%$$

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
a.	Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan berjenjang.	Penyempurnaan perjenjangan kinerja telah dilaksanakan dari tingkat Lembaga, Eselon I, II, III, IV s.d. level Staf, melalui Dialog Kinerja, Revisi Persekjen tentang IKU, dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pohon Kinerja dalam proses revisi, menyesuaikan <i>cascading</i> kinerja yang telah disempurnakan.	1) Keputusan Sekjen MK Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 – 2024 2) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 3) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Dialog Kinerja Tahun 2024 6 Mei 2024, sesuai undangan Nomor 689/PR.07/05/2024
b.	Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang belum SMART pada level lembaga hingga unit terkecil	Penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan belum SMART telah dilaksanakan melalui Dialog Kinerja, Revisi Persekjen tentang IKU, dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terdapat penambahan Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang menjadi indikator komposit Reformasi Birokrasi, dari tingkat Lembaga, Eselon I, II, III, IV s.d. level Staf	1) Keputusan Sekjen MK Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 – 2024 2) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 3) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Dialog Kinerja Tahun 2024 6 Mei 2024, sesuai undangan Nomor 689/PR.07/05/2024
c.	Memastikan Indikator Kinerja Utama pada lembaga dan unit kerja dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan tiap indikator	Formulasi Perhitungan untuk tingkat Eselon II sudah dijelaskan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, serta rumus perhitungan yang tercantum dalam Laporan Capaian Kinerja Bulanan Tingkat Eselon II Selain itu, saat ini sedang dalam proses penyusunan Buku definisi operasional dan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2024	1) Keputusan Sekjen MK Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 – 2024 2) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 3) Laporan Capaian Kinerja Bulanan Tingkat Eselon II 4) Buku definisi operasional dan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2024
d.	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan melakukan reviu pengukuran kinerja pada seluruh indikator pada unit kerja	Peningkatan kualitas pengukuran kinerja atas capaian masing-masing indikator kinerja telah dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja BKN. Membuat Surat Edaran kepada unit kerja untuk menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Bulanan. Reviu Indikator Kinerja telah dilaksanakan melalui kegiatan Dialog Kinerja	1) Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Para Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro/ Pusat/ Inspektur) dalam Melaporkan Capaian Kinerja Bulanan 2) Laporan Capaian Kinerja Bulanan Tingkat Eselon II 3) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Dialog Kinerja Tahun 2024 6 Mei 2024, sesuai

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
			undangan Nomor 689/PR.07/05/2024
e.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja lembaga, unit kerja, hingga pegawai, serta mendorong unit kerja untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i> kepada pegawai	Pemantauan secara berjenjang terhadap pencapaian kinerja lembaga, unit kerja, hingga pegawai telah dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja BKN. Pengisian capaian SKP bulanan sd level individu digunakan untuk dasar pemberian tunjangan kinerja. Pemantauan atas prestasi kerja pegawai juga dapat dilakukan melalui aplikasi Manajemen Talenta. Hasil pemantauan kinerja ini menjadi dasar untuk promosi jabatan serta pemilihan pegawai teladan.	1) Aplikasi E-Kinerja BKN 2) Aplikasi Sistem Manajemen Talenta Pegawai 3) Persekjen Nomor 77 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja 4) Persekjen Nomor 63 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal MK
f.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/ penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Seluruh Laporan Kinerja Eselon I dan II Tahun 2023 telah direvisi sesuai Notisi Hasil Evaluasi dari Inspektorat. Peningkatan kualitas laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 akan terus diupayakan pada periode penyusunan laporan kinerja tahun mendatang. Biro Renkeu dan Inspektorat akan melakukan pendampingan dalam tahap penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja, dan menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja.	1) Persekjen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja 2) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP unit kerja dari Inspektorat 3) Nota Dinas Permohonan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Eselon I Tahun 2023, dan Laporan Kinerja (LAKIP) Eselon II Tahun 2023 4) Nota Dinas Nomor 5241/2100/2100/PR.15.00/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Permohonan Revisi Laporan Kinerja (LAKIP) Kepaniteraan Tahun 2023, dan Laporan Kinerja (LAKIP) Eselon II Tahun 2023
g.	Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas /strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya	Perbaikan target tahun 2024 telah dilaksanakan dengan mengacu pada realisasi tahun sebelumnya. Penentuan revisi target telah melalui dialog kinerja yang melibatkan Eselon I dan seluruh Eselon II	1) Keputusan Sekjen MK Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 – 2024 2) Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 3) Rapat Koordinasi Penyempurnaan Indikator Kinerja dan Dialog Kinerja Tahun 2024 6 Mei 2024, sesuai undangan Nomor 689/PR.07/05/2024
h.	Melakukan evaluasi AKIP internal setiap tahun ke seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi	Pada tahun 2024 seluruh AKIP unit kerja akan dievaluasi setiap tahun oleh auditor internal MK.	1) Surat Tugas Nomor 202/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi T.A. 2023 2) Surat Tugas Nomor 201/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Umum T.A. 2023

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
			3) Surat Tugas Nomor 200/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan T.A. 2023 4) Surat Tugas Nomor 199/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan T.A. 2023 5) Surat Tugas Nomor 198/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol T.A. 2023 6) Surat Tugas Nomor 197/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi T.A. 2023 7) Surat Tugas Nomor 196/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi T.A. 2023 8) Surat Tugas Nomor 195/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan T.A. 2023 9) Surat Tugas Nomor 194/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Inspektorat T.A. 2023
i.	Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi AKIP di unit kerja	Peningkatan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun 2024 akan lebih diperdalam dengan mengacu pada Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Laporan akan diperdalam agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi AKIP di unit kerja. Seluruh Auditor terlibat dalam kegiatan evaluasi akuntabilitas internal sesuai Surat Tugas yang ditetapkan oleh Inspektorat.	1) Nota Dinas Inspektorat perihal Permintaan Data Dukung Evaluasi SAKIP Unit Kerja 2) Surat Tugas Nomor 202/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi T.A. 2023 3) Surat Tugas Nomor 201/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Umum T.A. 2023 4) Surat Tugas Nomor 200/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan T.A. 2023 5) Surat Tugas Nomor 199/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan T.A. 2023 6) Surat Tugas Nomor 198/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Biro

No	Rekomendasi Kemen PANRB	Tindak Lanjut MK	Bukti/ Evidence
			Hubungan Masyarakat dan Protokol T.A. 2023 7) Surat Tugas Nomor 197/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi T.A. 2023 8) Surat Tugas Nomor 196/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi T.A. 2023 9) Surat Tugas Nomor 195/2000/04/2024 Melaksanakan tugas untuk menyusun Evaluasi SAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan T.A. 2023 10) Surat Tugas Nomor 194/2000/04/2024 Melaksanakan tugas Evaluasi SAKIP Inspektorat T.A. 2023
j.	Mendorong seluruh unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat	Inspektorat telah menyusun Notisi yang berisi rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP unit kerja, untuk dijawab dan ditindaklanjuti oleh unit kerja. Selain itu, juga telah dilakukan rapat pembahasan hasil evaluasi SAKIP unit kerja antara Inspektorat dan unit kerja yang dievaluasi.	1) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP unit kerja dari Inspektorat 2) Notisi tindak lanjut Inspektorat perihal hasil evaluasi internal SAKIP unit kerja 3) Rapat pembahasan hasil evaluasi SAKIP unit kerja antara Inspektorat dan unit kerja yang dievaluasi.

Indikator ini mengukur tindaklanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Target tercapai apabila 80% dari rekomendasi Kemenpan RB dilaksanakan. Nilai kinerja ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti}} \times 100\% = \frac{100\%}{90\%} = 111,11\%$$

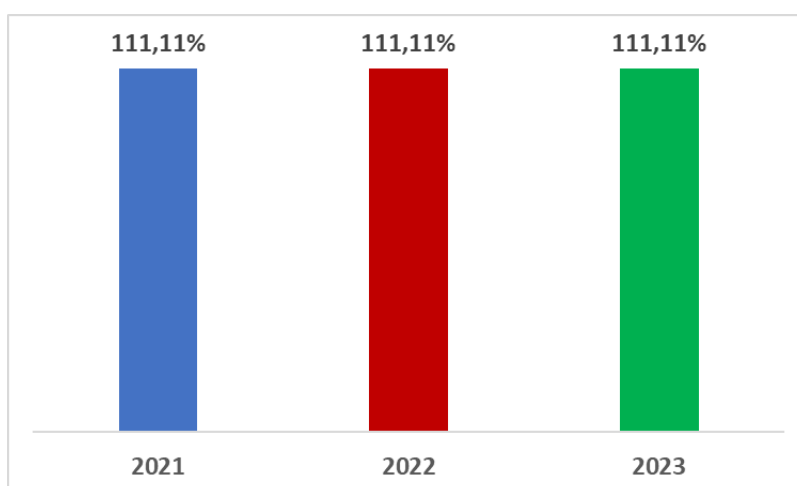
Capaian Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%

Pada tahun 2023, Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti sebesar 100%, melebihi target 90%, sehingga diperoleh capaian 111,11%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2021-2022

Baik pada tahun 2021, 2022, maupun 2023, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti, sehingga dari target tahun 2021-2023 sebesar 80% hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, dapat terealisasi 100%, sehingga dapat diperoleh capaian 111,11%. Tindak lanjut dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh pimpinan unit kerja, dan dituangkan dalam laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja MK.



5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2023 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum di Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Capaian Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 81	Skor 81,06	100,07%

Pada tahun 2023, realisasi Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan sebesar Skor 81,06, melebihi target Skor 81, sehingga diperoleh capaian 100,07%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Indeks Layanan Administrasi Umum ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:

Rumus Krejcie :

$$S = \{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\} / \{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}$$

Keterangan

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841)

N = Populasi sebanyak 0

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)

d = 0,05

Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh adalah 0 responden.

Responden terdiri dari semua pegawai Mahkamah Konstitusi PNS dan PPNNP kecuali bagi pegawai PNS dan PPNNP dari unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan tidak bisa menjadi responden untuk menilai unit kerjanya sendiri.

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
1	Layanan Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan	274	100%
	Total	274	100%

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem *broadcast* data. *Broadcast* data dilakukan melalui WhatsApp dan scan *barcode*.

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Indeks Layanan Administrasi Umum ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.

Tabel 11

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

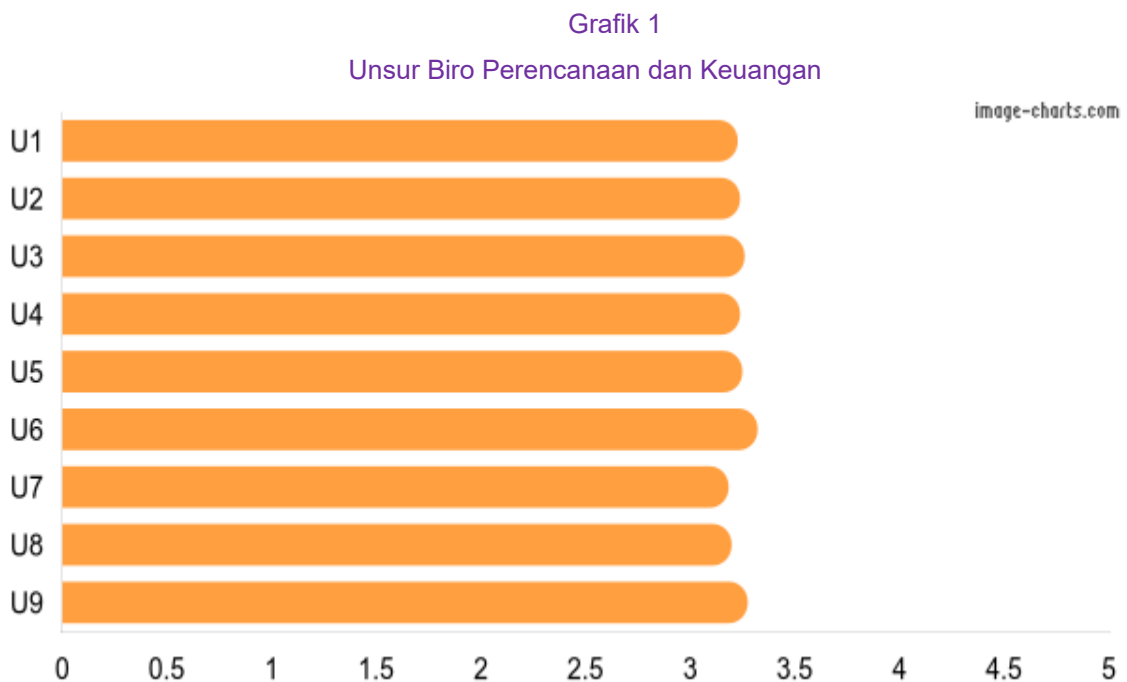
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Hasil Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan nilai Indeks Layanan Administrasi Umum sebesar **3.242**, dengan predikat **Baik**. Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut

Tabel 12

Nilai Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan

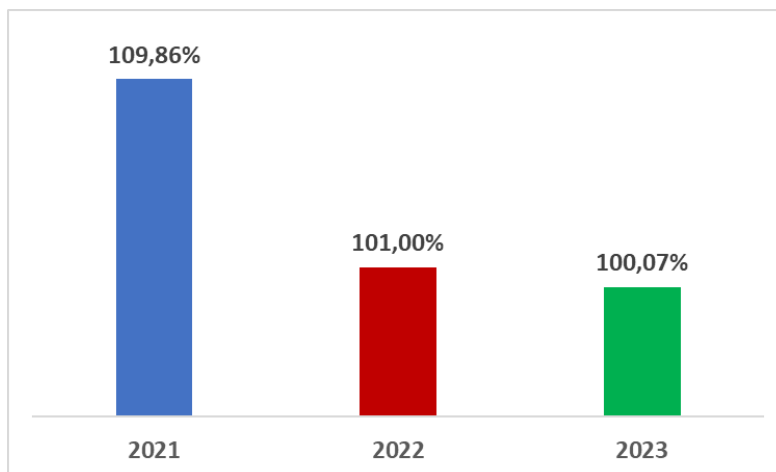
No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3,226	Baik
2	U2. Prosedur	3,237	Baik
3	U3. Sarana dan Prasarana	3,259	Baik
4	U4. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,237	Baik
5	U5. Perilaku Pelaksana	3,248	Baik
6	U6. Waktu Penyelesaian	3,321	Baik
7	U7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,182	Baik
8	U8. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,197	Baik
9	U9. Kompetensi Pelaksana	3,274	Baik
	Nilai Indeks	3,242	Baik
	Nilai Konversi	81,06	Baik



Berdasarkan Grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 9 unsur pelayanan dan dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni unsur “Penyelesaian hak-hak keuangan pegawai” dan nilai unsur terendah adalah unsur “Sosialisasi penjelasan peraturan dan ketentuan keuangan”.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2021-2022

Pada tahun 2021 s.d. tahun 2023, seluruh capaian indikator Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan di atas target. Meskipun tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun capaian tahun 2023 masih optimal. Ke depannya MK akan berupaya memperbaiki unsur yang mendapat nilai terendah yaitu “Sosialisasi penjelasan peraturan dan ketentuan keuangan”. Sosialisasi yang sudah dilaksanakan seperti sosialisasi Pajak atau SPT bagi seluruh pegawai, sosialisasi aplikasi SIGAP, dan sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM).



B. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

1. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi merupakan penyerapan perbulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2023.

Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

Fungsi Rencana Penyerapan Anggaran adalah:

- Sebagai sumber informasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap target dan capaian penyerapan anggaran per bulan dalam satu tahun anggaran.
- Sebagai alat monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Mahkamah Konstitusi, yang tergambar dari pola penyerapan anggaran dan deviasi antara rencana dengan realisasi anggaran.
- Sebagai alat analisis penyerapan anggaran atau instrument yang dapat memberikan rekomendasi dan solusi dalam pengendalian dan pengawasan penyerapan anggaran sehingga dapat menciptakan pola penyerapan anggaran yang baik. Rencana Penyerapan Dana Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada bulan Januari 2023.

Pada Tahun 2023 penyerapan anggaran MK adalah sebesar Rp.404.476.261.240,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp.407.191.105.000,-

atau sebesar 99,33%. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 2023 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi}}{\text{Target Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{99,337\%}{95\%} \times 100 = 104,56\%$$

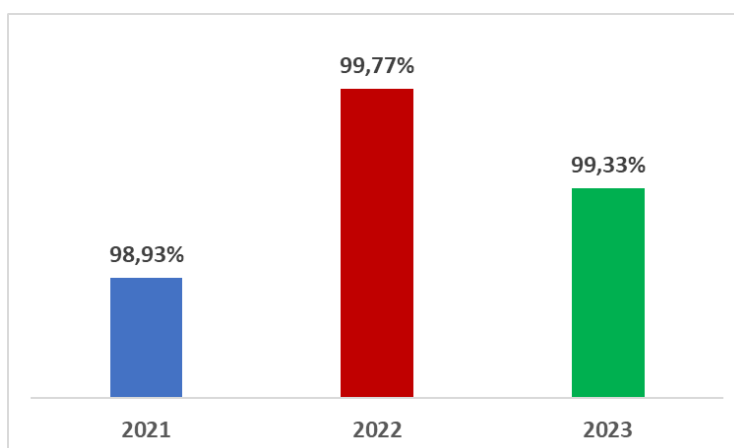
Capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	99,33%	104,56%

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dari target 95% telah terealisasi 99,33% sehingga capaian 104,56%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2021-2022

Pada tahun 2023, capaian penyerapan anggaran MK sangat baik yaitu sebesar 99,33% atau telah mendekati 100%. Sedangkan tahun 2022 capaian penyerapan anggaran MK sebesar 99,77%, dan tahun 2021 sebesar 98,93%. Sehingga jika dibandingkan target 95%, capaian penyerapan anggaran tahun 2021-2023 seluruhnya dia atas 100%.



2. Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan

Capaian indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%

Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian 100%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

a. Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi RI selama suatu periode yang wajib disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan.

No	Laporan Keuangan	Batas Waktu Penyampaian	Realisasi Penyampaian	Capaian
1	Laporan Keuangan TA 2022 (Unaudited)	17 Februari 2023	17 Februari 2023	Tepat waktu
2	Laporan Keuangan TA 2022 (Audited)	10 Mei 2023	10 Mei 2023	Tepat waktu
3	Laporan Keuangan Semester I TA 2023	31 Juli 2023	28 Juli 2023	Tepat waktu
4	Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023	31 Oktober 2023	30 Oktober 2023	Tepat waktu

Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Keuangan *Unaudited*, Laporan Keuangan *Audited*, Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Triwulan III.

Gambar 6
Hasil Laporan Keuangan Tahun 2023



Laporan Keuangan *Unaudited* T.A 2022 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan ini juga sebagai bahan pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan sehingga kegiatan dan anggaran dapat dievaluasi dalam bentuk opini. Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat akhir bulan kedua tahun berikutnya.

Sedangkan Laporan Keuangan *Audited* T.A 2022 merupakan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dinilai dalam bentuk opini. Laporan ini juga terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) namun terdapat perubahan atau koreksi audit yang dapat mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan. Perubahan atau koreksi audit ini ditetapkan melalui pertemuan tiga pihak (tripartied) antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan

Kementerian Keuangan pada bulan keempat atau menjelang berakhirnya waktu audit.

Laporan Keuangan Semesteran T.A 2023 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) selama periode 1 Januari s.d 30 Juni pada tahun berjalan yang wajib disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan ketujuh tahun berjalan (tanggal terakhir bulan Juli).

Demikian pula pada akhir triwulan ketiga tahun 2023 juga Mahkamah Konstitusi menyampaikan laporan keuangan triwulan ketiga kepada Kementerian Keuangan.

Selain itu dalam rangka prinsip akuntabilitas, Laporan Keuangan tersebut juga di publikasikan dalam *website* Mahkamah Konstitusi dan Media Cetak Nasional.

Gambar 7
Publikasi Laporan Keuangan MK di *Website* dan Publikasi Laporan Keuangan MK di Media Cetak Nasional

The screenshot displays the official website of the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes the court's name and the Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. A navigation bar lists various sections: BERANDA, PERALIHAN, HAKIM, PERAKARA, PERATURAN, and ADMINISTRASI UMUM. The left sidebar contains a menu for ADMINISTRASI UMUM, including AKUNTABILITAS PUBLIK, RENCANA STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN, LRAKP, LAPORAN KEUANGAN, and others. The main content area is titled 'LAPORAN KEUANGAN' and features a table of financial reports. The table lists the title of each report, the period covered, and the number of downloads. The footer contains contact information, including a phone number (2352-9000) and social media links.

Judul	Di Unduh
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Ta 2022 (Audited), dengan hasil predikcat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	8174
Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021.	14222
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Ta 2021 (Audited), dengan hasil predikcat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	18994
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 (Audited), dengan hasil predikcat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	21317
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 Tahun Anggaran 2019 (Audited), dengan hasil predikcat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	27284
Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 (Audited), dengan hasil predikcat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	28058

Generasi Y atau Milenial, Pemilih Terbanyak di Pemilu 2024

GENERASI Y atau milenial yang lahir pada 1981 sampai 1996 menjadi generasi terbanyak yang tercatat sebagai pemilih pada Pemilu 2024.

Anggota KPU R Betty Epsilon Idroos mengungkapkan pemilih milenial itu berjumlah 68 juta lebih atau setara 33,6% dari total pemilih.

"Sehanyak 66.822.369 atau 33,6% pemilih dari generasi milenial," kata Betty dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan DPT yang telah direkapitulasi secara nasional oleh KPU RI, Betty juga meny-

but bahwa pemilih generasi Z sebanyak 48.810.161 atau 22,85%. Jika diroral, pemilih milenial dan generasi Z mencapai 115.622.550 jiwa.

Artinya, pemilih milenial dan generasi Z mendominasi keseluruhan pemilih dalam DPT yang berjumlah 214.807.222 jiwa.

Betty menyebut pemilih yang termasuk generasi X sebanyak 26,07% atau sebanyak 57.486.482 jiwa. Sementara itu, *baby boomers* yang lahir pada 1946 sampai 1964 berjumlah

"Pre-boomers" sebanyak

Di sisi lain, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan sampai saat ini belum ada orang yang ditetapkan sebagai

Oleh karena itu, pihaknya belum dapat menindak kegiatan sosialisasi para tokoh yang telah diusung partai politik

"Karena kan calonnya cja belun ada, GR (gede rasa) baret

lun: ana, G.C (gede rasa) banger
orang tibu-tibu mendeklarasi-
kan calon presiden, wong ma-
sih proses," kata Lolly. (TréP-1)



PLENO DPT PEMILU 2024: (Dari kiri) Kurniasner KPU August Mellaz, Muhammad Afiluddin, Ketua KPU Husyini Asy'ari, dan Betty Epsilon Idrus memimpin juklarnya reput penguat untuk pembahasan rekapiulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, kemarin. Dalam rapat pleno itu, KPU menetapkan DPT pada Pemilu 2024 sebanyak 204.837.222 pemilih.

Prabowo dan Ganjar Bisa Mundur untuk Hindari Conflict of Interest

Dengan kesibukan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, tentu akan membuat prioritas antarkerja sebagai pejabat publik atau negara menjadi kabur.

THEOFILUS IFAN S
info@ugfwanidipmatia.com

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disusulkan mundur dari jabatannya supaya mereka bisa lebih leluasa mendekatkan diri

"Ganjar dan Prabowo tentu tidak ingin ketinggalan dalam bersosialisasi dari Anies (Haswedan)," kata pakar hukum tata negara Remy H. Run dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk 'Majelis Presiden-presidenan ala Ganjar kemarin'.

Refly mengatakan Anies tidak mengemban emban sebagai pejabat publik sehingga calon presiden (barapies) Ko Perubadan untuk Persatuan bisa bermobilisasi dan beraktivitas dengan bebas. "Ke mana pun dia pergi negara tidak masalah, dia bisa ke luar negeri, sepanjang pejabat publik tidak melanggar," ujar dia.

Kelly menyebut Ganjar dan Widy narinya akan menjadi orang-orang yang akan membawa perubahan di negeri ini. "Kita harus mengubah budaya politik di negeri ini," katanya. "Kita harus mengubah budaya politik yang selama ini diwariskan oleh orang-orang tua kita. Kita harus mengubah budaya politik yang selama ini diwariskan oleh orang-orang tua kita. Kita harus mengubah budaya politik yang selama ini diwariskan oleh orang-orang tua kita."

Patokan UU
Wakil Ketua Umum Partai Sufatri Dasso mengatakan jika mau Sukarno tidak harus jadi pejabat sebagai Menteri jales danau. UU Pemulu itu mendum, perolehan kita: undang saja dan jangan ada palan," ujar pimpinan DPR itu.

Undang-undang yang sud Dasso ialah perusan ma Konstitusi atau MK nyatakan menteri tak harus jadi pejabat saat mencalon sebagai presiden.

Amar tersebut tercantum dalam Peraturan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin

Dalam Amar Putusan Nomor 68/PUI-XX/2022 itu, Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa "menter dari pejabat setingkat menteri" dalam penjelasan Pasal 120 ayat (4).

akukan,"

politik sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengemukakan diri dari jabatannya, secara resmi, sebagai calon presiden, wakil presiden, pimpinan partai dan anggota MPR, pimpinan dewan

anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat

yang menteri dan pejabat tingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden." (Yd;3-2)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 (AUDITED)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Ta 2021 (Realisasi/ Anggaran)
PERMUDAAN				
Pendidikan tinggi, dasar, dan menengah	2.015.656,00	2.142.397,77	77,52	1.359.653,65
Jumlah Pengeluaran	2.015.656,00	2.142.397,77	77,52	1.359.653,65
Belanja Operasional				
Belanja Pegawai	82.727.781,30	96.028,38	0,28	54.806,00
Belanja Perjalanan Dinas	200.667.403,63	1.384.415.257,74	68,93	1.094.347.127,08
Belanja Lain-lain	256.789.078,09	284.927.740,31	29,25	241.348.787,90
Belanja Modal				
Belanja Akumulasi Tanah dan Bangunan	1.747.747.141,07	1.525.349.753,94	86,96	1.049.252.296,76
Belanja Akumulasi Peralatan dan Perlengkapan	268.910.750,00	892.149.438,00	100,00	486.976.871,91
Belanja Akumulasi Kendaraan Bermotor	423.943.000,00	423.943.000,00	100,00	423.943.000,00
Jumlah Belanja	3.042.437,87	3.042.392.392,39	99,99	3.042.794.176,65

[illegible]

LAPORAN OPERASIONAL		
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021		
(Dalam Ringkat)		
Uraian	TA 2022 (Milyar Rupiah)	TA 2021 (Milyar Rupiah)
REVENUS OPERASIONAL		
Penghasilan		
- Pendapatan Usaha Bank	1.064.302.423	1.036.966.059
- Pendapatan Usaha Lain	1.004.029.039	1.038.966.891
Jumlah Penghasilan		
	2.068.331.462	2.075.932.950
BIAYA		
- Gaji dan Gaji Pokok	3.085.113.084	3.027.418.457
- Gaji dan Gaji Tambahan	5.521.371.401	302.340.000
- Biaya Lain-lain	1.744.811.131	1.214.464.760
- Biaya Lain-lain Tambahan	10.088.377.515	6.967.177.515
- Biaya Lain-lain Tambahan Lain	95.594.097.222	24.496.097.222
- Biaya Lain-lain Tambahan Lain Lain	323.1.990.027	41.496.452.200
- Biaya Lain-lain Tambahan Lain Lain Lain	52.000	4.14

[illegible]

- [illegible]



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jalan Sisinga, No. 1, Jakarta 10110

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited dan Audited), Laporan Keuangan Semester TA 2023 dan Laporan Keuangan Semester III TA 2023 di tahun 2023, maka laporan keuangan yang tepat waktu dan terpublikasikan telah terealisasi sesuai dengan target.

Tabel 13
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan

b. Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan *cash basis*, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan *cash toward accrual basis* (basis kas menuju akrual). SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta

mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (*accrual basis*) dengan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Transaksi dicatat menggunakan *accrual basis*
- (2) Asset diukur menggunakan *historical cost*
- (3) Depresiasi untuk asset tetap
- (4) *Accrual basis* pada pendapatan dan beban
- (5) Cash basis pada Laporan Realisasi Anggaran
- (6) *Full disclosure*

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 16 tahun berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan hal tersebut. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Satker dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, sesuai dengan SAP, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Gambar 9
Capaian Opini WTP Laporan Keuangan T.A 2022

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKRL				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Nasional					
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WDP	⁷⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	⁷⁾

Pada tahun 2023 Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tabel 14
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan

c. Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN. Untuk Tahun 2023 ditargetkan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan adalah 100%, yaitu Laporan yang diserahkan kepada KPPN secara berkala setiap bulannya dan seluruh Laporan Pertanggungjawaban telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan.

Tabel 15
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan
Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d. Jumlah laporan Penerbitan SPM

PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM. Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
- (2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- (3) membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
- (4) menerbitkan SPM;
- (5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- (6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA
- (7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang paling sedikit memuat jumlah SPP yang diterima, jumlah SPM yang diterbitkan dan jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM. Pada tahun 2023 setiap bulannya pelaksanaan tugas PPSPM ini selalu dilaporkan kepada KPA, dengan demikian 12 Laporan penerbitan SPM dapat dicapai sesuai dengan target kinerja.

Tabel 16
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah laporan Penerbitan SPM	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

e. Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan secara internal yaitu rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara pengelola Modul Aset dan Perediaan dengan Pengelola Modul GLP Aplikasi SAKTI dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran yang dilakukan antara Satuan Kerja dan KPPN setiap bulan dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yang ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi.

Pada Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan 12 rekonsiliasi bulanan internal dan 12 rekonsiliasi bulanan eksternal. Dengan demikian target kinerja sebanyak 24 rekonsiliasi laporan keuangan telah terealisasi sesuai target yang ingin dicapai.

Tabel 17
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan

Capaian indikator kinerja Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan} = \frac{\text{Jumlah \% Capaian Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}}{\text{Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan}}$$

$$= \frac{700\%}{5 \text{ Dokumen}} = 140\%$$

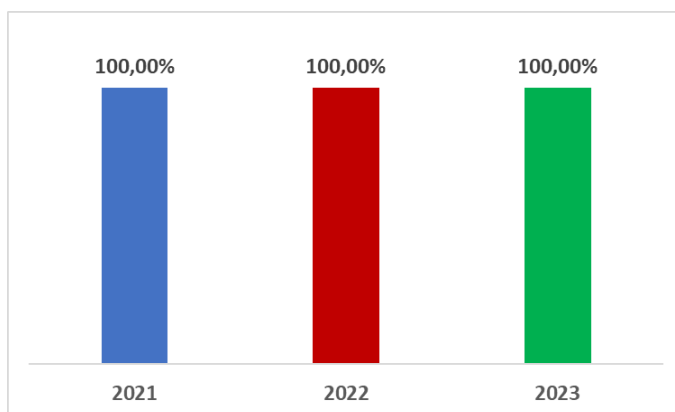
Capaian indikator kinerja Peresentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan melebihi target yaitu 140% dari 100% target ditetapkan.

Tabel 18
Rincian Realisasi tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan

No	Nama Dokumen	Target	Realisasi	Nilai Capaian
1	Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan	2 Laporan	4 Laporan	200%
2	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	2 Laporan	4 Laporan	200%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan	100%	100%	100%
4	Jumlah laporan Penerbitan SPM	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Direkonsiliasi dengan Kementerian Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	100%
Jumlah Nilai Capaian				700%
Rata-rata Persentase Capaian tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan				140%

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2021-2022

Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan baik tahun 2021, 2022, maupun 2023 seluruhnya dapat tercapai 100%. Laporan Keuangan MK yang transparan dan akuntabel telah dibuktikan oleh MK melalui predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 18 tahun berturut-turut, atas Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.



3. Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pada Tahun Anggaran 2023, Pagu anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 59.924.383.000,-. Capaian realisasi anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 59.881.057.221,-.

Sesuai dengan rencana aksi Perjanjian Kinerja, target indikator kinerja Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan tercapai apabila Gaji dan Tunjangan pegawai MK telah dibayarkan selama 12 bulan. Sehingga Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam Tahun 2023 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan} = \frac{\text{Realisasi bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan}}{\text{Target Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan}} \times 100\%$$

$$= \frac{12 \text{ bulan pembayaran}}{12 \text{ bulan pembayaran}} \times 100 = 100\%$$

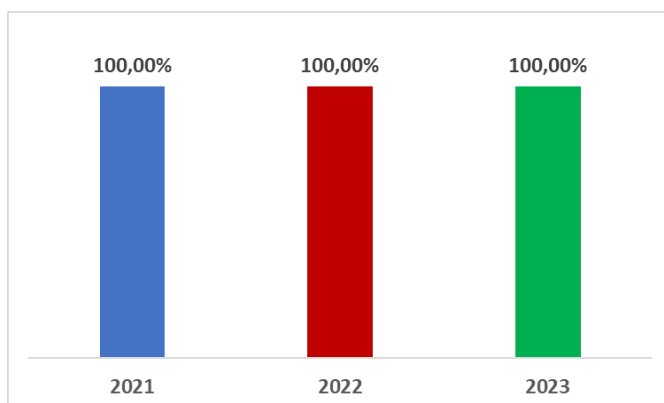
Capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%

Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan dari target 100% telah terealisasi 100% sehingga capaian 100%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2021-2022

Pembayaran gaji dan tunjangan merupakan prioritas MK dalam memberikan reward untuk kesejahteraan para pegawai karena telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik setiap bulan. Pembayaran gaji dan tunjangan dapat dilaksanakan tepat waktu setiap bulannya, sehingga realisasi dan target dapat tercapai sebanyak 12 bulan pembayaran. Dengan demikian capaian indikator kinerja Persentase tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan adalah 100% sejak tahun 2021, 2022, maupun 2023.



C. Prestasi Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Lainnya

1. Laporan Pengadaan

Laporan pengadaan dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pengadaan yang diajukan oleh unit kerja selama tahun 2023. Laporan realiasi adalah sebanyak 12 (dua belas) laporan yang dilaporkan setiap bulan, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam pencapaiannya 100%. Bukti pendukung ada pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/15BOmu4aldlg51x8uq-E3PQ7esq_wnTon

2. Laporan Input Aplikasi SMART MONEV Kinerja Penganggaran dari DJA

Dalam rangka memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) K/L. Melalui aplikasi Sistem MONEV Kinerja Terpadu (SMART) berbasis web monev.anggaran@depkeu.go.id, pengukuran dan evaluasi kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL dijalankan.

Mahkamah Konstitusi melaporkan capaian tersebut tiap bulan yang dilaporkan dalam 1 (satu) output yaitu laporan capaian input aplikasi Smart DJA. Realisasi target laporan yang disusun adalah sebanyak 12 (empat) laporan, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam pencapaiannya 100%. Bukti pendukung ada pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/15BOmu4aldlg51x8uq-E3PQ7esg_wnTon

3. Laporan Triwulanan ke Bappenas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, setiap unit organisasi Eselon I K/L melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renja K/L secara triwulanan melalui sistem e-Monev Bappenas berbasis web [e-monev.bappenas.go.id](http://monev.bappenas.go.id). Realisasi target laporan yang disusun adalah sebanyak 4 (empat) laporan, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam pencapaiannya 100%. Bukti pendukung ada pada link berikut <https://drive.google.com/drive/folders/1fKTvVZ-jBmRyJF99EIPCFYK4X1ITE5MK>

4. Laporan Monitoring Capaian Kinerja melalui Aplikasi e-Kinerja

Pengumpulan data kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Kepaniteraan oleh Panitera Muda I, Panitera Muda II, Panitera Muda III, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun. Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun yang disusun oleh Kepala Biro/Pusat (Eselon II), Kepala Bagian/Bidang (Eselon III), Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Eselon IV), sampai dengan level staf (individu).

Untuk CPNS belum menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sehingga belum diwajibkan untuk mengisi data capaian kinerja pada aplikasi e-Kinerja di Tahun 2023.

Data Capaian Kinerja dilaporkan secara berkala setiap bulan melalui sistem aplikasi e-Kinerja. Berikut ini hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan input aplikasi e-Kinerja. Pengukuran kinerja ini dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Data capaian ini bersifat final dan wajib dicantumkan pada LAKIP Eselon II Tahun 2023 untuk disampaikan kepada Kemen PANRB.

Bukti pendukung ada pada link berikut
https://drive.google.com/drive/folders/1Dp9HacZIRp5x2NOt4I_7dyp8kRjRC322

5. Laporan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Laporan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran adalah hasil output dari rapat per triwulan yang membahas tentang evaluasi realisasi anggaran, realisasi pengadaan, rencana aksi kegiatan dan juga rencana penyerapan anggaran untuk bulan-bulan berikutnya selama tahun berjalan. Realisasi target laporan yang disusun adalah sebanyak 4 (empat) laporan, sehingga dapat dikatakan berhasil dalam pencapaiannya 100%. Bukti pendukung ada pada link berikut
<https://drive.google.com/drive/folders/1rDbb1qDX6FOULmKuDx5EwMilga-rO8C>

6. Laporan Survei

Dalam rangka meningkatkan efektivita pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM, maka Instansi Pemerintah perlu melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada unit/satuan kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas dan minimal meliputi aspek prosedur, persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian, respon, performa, sarana dan pengaduan. Pelaksanaan survei mandiri diutamakan memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survei.

Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi layanan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan pengawal konstitusi secara baik dan profesional sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi yang diberikan kepada masyarakat, maka diperlukan penilaian dari penerima layanan Mahkamah Konstitusi. Penilaian yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Mahkamah Konstitusi terkait aspek apa saja yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, agar dapat menjadi gambaran perbaikan aspek apa saja yang diinginkan oleh penerima pelayanan yang ada di Mahkamah Konstitusi baik pelayanan eksternal maupun pelayanan Internal.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan pengadaan sewa aplikasi e-survei kepada PT. KOKEK selama satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 dan kegiatan bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memperkenalkan Aplikasi e-survei yang telah di sewa oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrument dalam melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Mahkamah Konstitusi;
2. Memberikan bimbingan teknis tata cara penggunaan aplikasi e-survei untuk survei pengukuran kinerja MK dan survei pengukuran tingkat pelayanan yang ada di Mahkamah Konstitusi;
3. Memberikan pemahaman tentang tata cara penginputan kuesioner ke dalam aplikasi e-Survei, Penetapan Populasi, pembuatan link dan Laporan

Beberapa indikator kinerja yang diukur tersebut terdiri atas indeks kinerja yang membutuhkan kegiatan penelitian dalam bentuk survei. Oleh karena itu, ditetapkan survei atas indikator kinerja meliputi 3 (tiga) ruang lingkup, diantaranya:

- a. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara;
- c. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Administrasi Umum

Gambar 8
Hasil Laporan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023



Kegiatan survei Pengukuran Kinerja atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 memperoleh **nilai indkes, Konversi Mutu pada Mahkamah Konstitusi**, sebagai berikut:

Tabel 19
Nilai Indeks, Konversi Mutu pada Mahkamah Konstitusi

No	Nama Survei	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai Konversi	Kategori
1.	Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	3,506	Skor 87,65	Baik
2.	Survei Indeks Pelayanan Sistem Informasi	3,51	Skor 87,76	Baik
	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	3,508	Skor 87,71	Baik

No	Indeks Administrasi Umum	Responden (orang)	Target 2023 (Skor)	Nilai Tahun 2023		Capaian Nilai 2023 dibandingkan Target
				Nilai Konversi	Indeks (Skor)	
1	Survei Indeks Layanan Inspektorat	248	81	81,05	3,242	100,06%
2	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan					
	Survei Pengukuran Kinerja Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	197	80	81,39	3,255	101,74%
	Survei Pengukuran Kinerja Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	205	81	81,1	3,244	100,12%
3	Biro Humas dan Protokol					
	Survei Indeks Layanan TU Pimpinan dan Keprotokolan	257	75	81,6	3,264	108,80%
	Survei Indeks Layanan Biro Humas dan Protokol	235	75	79,19	3,168	106%
4	Survei Indeks Layanan Kepaniteraan	249	80	82,82	3,313	103,53%
5	Survei Indeks Layanan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	211	80	80,75	3,23	100,94%
6	Survei Indeks Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	258	-	85,9	3,436	-
7	Puslitka					
	Survei Indeks Layanan Kunjungan Pusat Konstitusi	208	-	78,59	3,144	-
	Survei Indeks Layanan Perpustakaan	229	81	81,16	3,246	100,20%
8	Survei Indeks Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	260	81	81,06	3,113	100,07%
9	Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Biro SDMO	268	80	80,22	3,209	100,28%
10	Survei Indeks Layanan Biro Umum	189	80	80,75	3,23	101,61%
Indeks Administrasi Umum			80	81,20	3,238	101,50%

Bukti pendukung ada pada link berikut

<https://drive.google.com/drive/folders/1hJ8WwvxrTK3flwnGhRFHJDGQ9P6v3JFJ>

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan periode Januari – Desember tahun 2023 dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2023 dikategorikan “**Berhasil**” dengan capaian sebesar **105,28%**.

Hal ini karena dari 2 (*dua*) **sasaran strategis** dan 8 (*delapan*) **indikator kinerja**, ada 5 (lima) Indikator Kinerja melebihi target, 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai target dan 1 (satu) Indikator Kinerja tidak mencapai target. Sedangkan penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp.92.828.386.409,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp.92.883.215.000,- atau sebesar 99,94%.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, termasuk penyerapan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Meningkatkan pembinaan SDM perencanaan dan keuangan agar diperoleh tenaga perencana keuangan yang profesional dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi staf di perencanaan dan evaluasi serta keuangan agar memiliki kemampuan membuat perencanaan yang tepat dan dapat memiliki kemampuan menganalisis dan menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat
- b. Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan unit kerja, tentang penyampaian data dan laporan tepat waktu dan pelaksanaan kegiatan sehingga kinerja meningkat dan anggaran dapat terserap secara optimal;
- c. Meningkatkan telaahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan agar diperoleh kegiatan prioritas yang dibiayai untuk mendukung keberhasilan program utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

LAMPIRAN



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tatang Garjito

Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan

Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Heru Setiawan



Pihak Pertama,

Tatang Garjito



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR



Digital Signature

mk-354922912230112034640

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas	1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	85%
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85
		3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%
		4. Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%
		5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 81
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%
		2. Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	100%
		3. Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%

Program / KRO		Anggaran	
Dukungan Manajemen			
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	104.367.344.000	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	245.000.000	
Jumlah		Rp	104.612.344.000



**PENJELASAN RENCANA KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
1.	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Evaluasi yang berkualitas																
	a Persentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang tepat waktu	85%	Target tercapai jika 85% dari 23 Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran telah tersusun tepat waktu. Rumus Realisasi Jumlah Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang disusun tepat waktu: Target Jumlah Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran yang disusun x 100%	Penyusunan Dokumen perencanaan strategis, kinerja dan anggaran	13 %	22 %	30 %	35 %	43 %	48 %	61 %	65 %	70 %	74 %	83 %	100 %	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)
				1 Reviu Baseline			1 D ok										
				2 Rencana Kerja Mahkamah Konstitusi				1 D ok									
				3 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran							1 D ok						



				4	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Alokasi Anggaran										1 D ok		
				5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)											1 Dok	
				6	Proposal PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)			1 D ok			1 D ok						
				7	Penyampaian Data Target dan Capaian Kinerja MK dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2023						1 D ok						
				8	Laporan RDP dengan Komisi III DPR RI						1 D ok	1 D ok				1 D ok	
				9	Dokumen Usulan Pagu Indikatif	1 D ok											



				10	Dokumen Usulan Tambahan Anggaran melalui BA BUN 2022	1 D ok											
				11	Rencana Aksi Kegiatan dan Rencana Penyerapan Anggaran		1 D ok										
				12	Kalender Kegiatan		1 D ok										
				13	Rencana Umum Pengadaan											1 Dok	
				14	Usulan Revisi Anggaran (DIPA)			1 D ok			1 D ok			1 D ok		1 Dok	
				15	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Raker MK											1 Dok	
				16	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan										1 D ok		
				17	Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja											1 Dok	
	b	Indeks Kualitas Pengelolaan Anggaran	Skor 85	Target Tercapai apabila nilai Skor dari penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Ditjen Perbendaharaan mencapai Skor 85	Indikator ini dapat dilihat pada OM-SPAN Kementerian Keuangan melalui MONEVPA dilihat pada Indikator Pelaksanaan Anggaran											Skor 85	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)



	c	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%	Target tercapai jika Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu telah tersusun dan ditandatangani	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu	100%											Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)
	d	Persentase hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	90%	Indikator ini mengukur tindaklanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Target tercapai apabila 80% dari rekomendasi Kemenpan RB dilaksanakan. Rumus: Jumlah Hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti: jumlah hasil evaluasi kinerja Kemenpan RB x 100%	hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti											90%	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)
					1	Melaksanakan tindaklanjut atas evaluasi Kemenpan RB											tindaklanjut dari evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
	e	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 77	Indikator ini merupakan Hasil dari Survey Internal Mahkamah Konstitusi	hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti											Skor 81	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)



2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel																	
a	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95%	Target tercapai jika persentase penyerapan anggaran Mahkamah Konstitusi sebesar 95%. Data realisasi yang dipakai adalah data realisasi hasil rekonsiliasi dengan KPPN. Rumus: (Realisasi Penyerapan Anggaran MK TA 2022: Pagu Anggaran MK TA 2022) x 100%	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95%	Bagian Keuangan (Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Perbendaharaan)
				1	Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95%	
b	Persentase tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	100%	Target tercapai apabila laporan keuangan yang akuntabel dan transparan telah disusun meliputi: - Laporan keuangan yang tepat waktu dan terpublikasikan - Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah - Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Pene	Persentase tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Bagian Keuangan (Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan)
				1	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	



	c	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	Target tercapai apabila Gaji dan Tunjangan pegawai MK telah dibayarkan selama 12 bulan	Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Keuangan (Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan)
					1	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id